

**LAPORAN  
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP)  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KABUPATEN BATANG  
TAHUN 2017**

**DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN  
Batang, Januari 2018**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan Karunia-Nya, kami telah dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2017. LKjIP SKPD Tahun 2017 merupakan bentuk komitmen nyata Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik sebagai mana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk LKjIP.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan penerapan Rencana Strategis (Renstra) dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing-masing perangkat daerah, serta keberhasilan capaian sasaran saat ini untuk percepatan dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun yang akan datang. Melalui penyusunan LKjIP juga dapat memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip *good governance*, yaitu dalam rangka terwujudnya transparansi dan akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya untuk peningkatan kinerja di masa mendatang.

Batang, Maret 2018  
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan  
Permukiman Kabupaten Batang

**ARI YUDIANTO, SH.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19651107 199003 1005

# DAFTAR ISI

Ikhtisar Eksekutif

Bab. I. Pendahuluan

- A. Gambaran Umum
- B. Permasalahan Yang Dihadapi
- C. Maksud dan Tujuan LKjIP
- D. Dasar Hukum Penyusunan LKjIP
- E. Sistematika Penyusunan LKjIP

Bab. II. Perencanaan dan Penetapan Kinerja

- A. Perencanaan Kinerja
- B. Penetapan Kinerja Tahun ( PK )
- C. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2017

Bab. III. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017

- A. Pengukuran Kinerja
- B. Analisis Hasil Pengukuran Kinerja
- C. Akuntabilitas Keuangan

Bab. IV. Penutup

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang melekat guna mewujudkan Good Government di era otonomi daerah dimana mengharuskan kita untuk dapat merespon berbagai tuntutan dinamika global yang berubah sangat cepat dan sarat kompetitif, maka Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang telah mempunyai konsep perencanaan yang komprehensif dan implementatif yang akan dijadikan panduan (guidance) dalam melaksanakan pembangunan, bersinergi dan berintegrasi antara sektor/sub sektor. Perencanaan tersebut tertuang dalam perencanaan strategik Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang yang mengandung visi, misi nilai, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran utama yang telah ditetapkan dalam rencana strategik serta sejauh mana SKPD mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

Visi Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang adalah **“Terwujudnya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak guna peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam menunjang pembangunan”**. Sedangkan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang adalah :

1. Melaksanakan keterpaduan pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman serta penataan pertamanan berdasarkan penataan ruang wilayah.
2. Meningkatkan cakupan layanan air bersih/air minum dan sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas rumah beserta lingkungannya yang layak huni.
4. Meningkatkan kemandirian pemerintah daerah serta mendorong kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.
5. Meningkatkan pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan.

6. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance.

Pembangunan sarana dan prasarana bidang Perumahan dan Permukiman di Kab. Batang mencakup pembangunan sarana Prasarana lingkungan, penyediaan dan pengelolaan air bersih, sarana prasarana penyehatan lingkungan pemukiman serta sarana prasarana perumahan pemukiman agar fasilitas umum tersebut dapat dinikmati/ difungsikan oleh masyarakat dengan optimal.

### **Bidang Perumahan dan Pertanahan**

Pembangunan Bidang perumahan dan pertanahan akan mengikutsertakan banyak aspek karena harus dilakukan dalam suatu kerangka perencanaan pembangunan terpadu dengan sektor-sektor lain. Perubahan sosial ekonomi yang dapat membawa dampak berubahnya kondisi perumahan dimana perubahan kebutuhan perumahan dan penanganan permasalahan pertanahan tidak pernah menurun sementara disisi lain tidak diikuti dengan bertambahnya persediaan perumahan secara proporsional.

Ketidakproporsionalan antara permintaan dan pemenuhan kebutuhan perumahan antara lain adanya kendala keterbatasan lahan, kondisi sosial ekonomi masyarakat serta ancaman perubahan kondisi lingkungan bahkan kecenderungan degradasi lingkungan, berbagai hal tersebut sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius untuk ditangani agar tidak membawa dampak lanjutan yang merugikan berbagai pihak.

Disamping itu pembangunan dan peningkatan sarana dan prasarana rumah tidak layak huni juga harus ditingkatkan dalam upaya pengentasan kemiskinan sehingga jumlah rumah layani huni setiap tahunnya meningkat.

### **Bidang Permukiman.**

Pembangunan Bidang Permukiman akan mengikutsertakan banyak aspek karena harus dilakukan dalam suatu kerangka perencanaan pembangunan terpadu dengan sektor-sektor lain. Perubahan sosial ekonomi yang dapat membawa dampak berubahnya kondisi permukiman dimana perubahan kebutuhan permukiman tidak pernah menurun sementara

disisi lain tidak diikuti dengan bertambahnya persediaan perumahan dan permukiman secara proporsional.

Ketidakproporsionalan antara permintaan dan pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi antara lain adanya kendala keterbatasan mata air, kondisi sosial ekonomi masyarakat serta ancaman perubahan kondisi lingkungan bahkan kecenderungan degradasi lingkungan, berbagai hal tersebut sudah selayaknya mendapatkan perhatian serius untuk ditangani agar tidak membawa dampak lanjutan yang merugikan berbagai pihak.

Disamping itu pembangunan sarana dan prasarana air bersih juga harus senantiasa ditingkatkan dalam upaya peningkatan kesehatan masyarakat di Kabupaten Batang.

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. GAMBARAN UMUM DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN KAB. BATANG.**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 60 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2008 Nomor : 3 Seri : D No : 2) dan Peraturan Bupati Batang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Kebersihan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang, mempunyai tugas pokok :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman ;
- b. penyusunan rencana teknis di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. pemantauan, pengendalian dan evaluasi di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- e. perintisan dan fasilitasi pembangunan perumahan dan permukiman;
- f. pembinaan dan pemberian bimbingan teknis di perumahan rakyat dan kawasan permukiman
- g. penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- h. pelayanan umum, perijinan dan pengaturan di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman ;
- i. pelaksanaan koordinasi dan hubungan kerja dengan instansi terkait di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- j. pelaksanaan pengawasan, monitoring dan laporan dilingkungan dinas;
- k. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dilingkungan dinas;



- l. penyelenggaraan ketatausahaan yang meliputi segala kegiatan di bidang umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan dan bina program;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang didukung oleh sumber daya sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia

Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang mempunyai sumber daya manusia sebanyak 69 pegawai, yang terdiri dari 34 orang PNS 35 orang THL. Gambaran tentang potensi kepegawaian adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1  
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Golongan  
Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang

No.	Klasifikasi	Jumlah
1)	Komposisi Menurut Golongan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Golongan IV</li> <li>• Golongan III</li> <li>• Golongan II</li> <li>• Golongan I</li> <li>• Non PNS</li> </ul>	3 orang 17 orang 15 orang 1 orang 35 orang
2)	Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sarjana S2</li> <li>• Sarjana S1</li> <li>• Sarjana Muda / D3</li> <li>• SLTA</li> <li>• SMP</li> <li>• SD</li> </ul>	1 orang 15 orang 1 orang 18 orang 1 orang orang
3)	Komposisi Menurut Umur	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 20 – 30 tahun</li> <li>• 31 – 40 tahun</li> <li>• 41 – 50 tahun</li> <li>• 51 – 58 tahun</li> </ul>	2 orang 6 orang 18 orang 10 orang

	Jumlah	36 orang
--	--------	----------

2. Sarana Prasarana

Gambaran sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang, sbb :

Tabel 1.2  
Sarana Prasarana  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang

Uraian	Jumlah	Nilai (Rp)
Tanah	4	4.297.698.000,-
<b>Peralatan dan Mesin :</b>		
a. Alat-alat besar	6	3.886.065.482,-
b. Alat-alat angkutan	257	11.781.386.041,-
c. Alat-alat bengkel dan alat ukur	28	201.545.237,-
d. Alat-alat kantor dan rumah tangga	1.377	298.323.500,-
e. Alat-alat studio dan komunikasi	27	165.765.553,-
g. Alat Pertanian dan Peternakan	4	6.425.000,-
<b>Gedung dan Bangunan :</b>		
a. Bangunan Gedung	6	2.225.117.000,0
Aset tetap lainnya		
a. Buku Perpustakaan	29	567.446.000,-
<b>Jumlah</b>		<b>23.429.771.813,-</b>

Dari sarana dan prasarana tersebut diatas 25 % merupakan sarana dan prasarana dalam kondisi rusak berat sedangkan sisanya dalam kondisi baik.

3. Sumber Daya Keuangan

Pada tahun 2017 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya didukung anggaran sebesar Rp 13.622.502.000,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3  
Anggaran Belanja 2017

Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Batang

No.	Jenis Pembiayaan	Nilai (Rp.)
1	Belanja Tidak Langsung	2.981.137.937,-
2	Belanja Langsung :	
	- Belanja Pegawai	768.905.500,-
	- Belanja Barang dan Jasa	7.717.199.300,-
	- Belanja Modal	5.676.396.900,-
	Jumlah	16.603.639.937,-

**B. PERMASALAHAN UTAMA YANG DIHADAPI**

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain :

1. Terbatasnya jumlah tenaga/SDM yang menangani dibidang tenaga administarsi (operasional komputer )
2. Perlu adanya master plan / data base di bidang drainae dan jalan lingkungan untuk kota Batang ;
3. Perencanaan drainase harus terintegrasi melalui satu sistem, namun anggaran untuk grand desain/masterplan drainase cukup besar dan relatif sulit mengusulkan pekerjaan perencanaan dengan nominal besar.
4. Kesadaran masyarakat bahwa pemeliharaan infrastruktur drainase menjadi tanggung jawab bersama rendah sehingga banyak saluran yang tidak berfungsi akibat sedimentasi/sampah/buangan rumah tangga.
5. Masih adanya kualitas rumah yang kurang layak huni, dikarenakan sebagian besar wilayah Kabupaten Batang merupakan wilayah pedesaan yang didominasi karakter masyarakat yang bermata pencaharian di bidang pertanian, perkebunan dan perikanan
6. Masih banyaknya rumah yang tidak layak huni di Kabupaten Batang.

### **C. MAKSUD DAN TUJUAN LKjIP**

Dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara negara memiliki kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). LKjIP tersebut disusun berdasarkan dokumen perencanaan dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Penyusunan LKjIP Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang tahun 2017 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi dan rencana kinerja tahun 2017 dan umpan balik dalam perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja serta mendorong penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (good governance)..

### **D. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LKjIP**

1. TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.
2. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme , sebagai tindak lanjut dari Tap MPR.
3. Instruksi Presiden Nomor 07 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi
5. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 29 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKJIP**

Sistematika Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif

Bab I : Pendahuluan

Menyajikan gambaran umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab Batang, permasalahan yang dihadapi, maksud dan tujuan serta dasar hukum penyusunan LkjIP

Bab II : Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

Menyajikan ikhtisar sasaran utama yang ingin diraih pada tahun 2017, kaitan sasaran tersebut dengan visi – misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Perjanjian Kinerja tahun 2017.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

Menyajikan hasil pengukuran dan analisis kinerja yaitu uraian tentang keberhasilan atau kegagalan pencapaian sasaran strategis, permasalahan yang dihadapi dan rencana penyelesaiannya serta penyajian aspek akuntabilitas keuangan.

: Penutup

Bab IV

Lampiran – lampiran

### BAB III

## PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

### A. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja tahun 2017 disusun berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) periode tahun 2012 - 2017 yang mengacu pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Batang periode tahun 2012 - 2017 dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Visi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang periode tahun 2017 adalah ” **Terwujudnya sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman yang layak guna peningkatan kualitas hidup masyarakat dalam menunjang pembangunan** “

Untuk mewujudkan visi tersebut maka misi yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan keterpaduan pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman serta penataan pertamanan berdasarkan penataan ruang wilayah.
2. Meningkatkan cakupan layanan air bersih/air minum dan sanitasi layak di perkotaan dan perdesaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas rumah beserta lingkungannya yang layak huni.
4. Meningkatkan kemandirian pemerintah daerah serta mendorong kemitraan dengan masyarakat dan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman.
5. Meningkatkan pelayanan fasilitasi penyelesaian permasalahan pertanahan.
6. Mewujudkan organisasi yang efisien, tata laksana yang efektif dan SDM yang profesional dengan menerapkan prinsip good governance.

Visi dan Misi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang tersebut dijabarkan lebih operasional ke dalam 1 tujuan dan 1 sasaran, yang akan dicapai melalui penetapan kebijakan dan pelaksanaan 15 program serta 34 kegiatan. Rincian tujuan dan sasaran beserta indikator kinerjanya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Sasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1)	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (infrastruktur) bidang permukiman (ciptakarya) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	a. Rumah tangga pengguna air bersih
		b. Rumah tangga dengan akses aman bersanitasi
		c. Drainase lingkungan kondisi baik
		d. Rumah Layak Huni
		e. Jalan lingkungan kondisi baik

## B. Perjanjian Kinerja

Pada awal tahun setelah penetapan anggaran tahun 2017 Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang telah menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dengan memperhatikan kapasitas sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang, baik sumber daya aparatur, sumber daya keuangan, sarana dan prasarana, kondisi masyarakat dan daya dukung lingkungan serta berdasarkan pada perencanaan strategis tahun 2017

Rincian penetapan kinerja Pemerintah Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2  
Penetapan Kinerja Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman  
Kabupaten Batang Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/Kegiatan	Anggaran
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (infrastruktur) bidang permukiman (ciptakarya) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat	a. Rumah tangga pengguna air bersih		Program Pengembangan Perumahan 1. Kegiatan Penetapan Kebijakan, Strategis dan program perumahan 2. Kegiatan	375.000.000
	b. Rumah tangga dengan akses aman bersanitasi			
	c. Drainase lingkungan kondisi baik			599.450.000
	d. Rumah Layak Huni			

	e. Jalan lingkungan kondisi baik		Pembangunan Sarana dan Prasarana Rumah Sederhana Sehat. Program Lingkungan Sehat Perumahan : 1. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin	50.000.000
--	----------------------------------	--	---	------------

Untuk mencapai target indikator kinerja sasaran tahun 2017 yang diperjanjikan tersebut maka Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang telah menetapkan 15 program serta 34 kegiatan.



### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja menggambarkan capaian kinerja sasaran atas Penetapan Kinerja (PK) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman abupaten Batang. Penetapan Kinerja tersebut merupakan prasyarat untuk melakukan pengukuran kinerja dan merupakan target kinerja yang harus dicapai sebagai wujud komitmen dari pimpinan dan seluruh anggota organisasi. Selanjutnya dilakukan pengukuran kinerja yang merupakan perbandingan antara target kinerja (performance plan) yang telah ditetapkan dengan realisasinya (performance result) untuk mengetahui celah kinerja (performance gap). Atas celah kinerja tersebut kemudian dianalisis untuk mengetahui penyebab keberhasilan dan kegagalannya. Jika berhasil akan menjadi dasar dalam penetapan target tahun berikutnya, dan jika gagal akan menjadi bahan perbaikan untuk peningkatan kinerja di masa datang (performance improvement).

Untuk lebih menggambarkan keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Skala	Kategori
Lebih dari 100%	Sangat berhasil/sangat baik
75 s/d 100 %	Cukup Berhasil/cukup Baik
55 – 75%	Kurang berhasil/kurang baik
Kurang dari 55	Tidak berhasil

#### **A. PENGUKURAN KINERJA**

Pengukuran kinerja pada Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan PermukimanKabupaten Batang untuk mengetahui capaian kinerja nyata terkendala oleh beberapa hal antara lain belum

optimalnya perumusan sasaran yang selaras dengan kegiatan dan program, belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, belum adanya mekanisme pengumpulan data kinerja serta beberapa indikator belum dapat menyajikan penentuan target secara tepat.

Gambaran keberhasilan Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang dalam mencapai tujuan dan sasaran pada tahun 2017, direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai berikut :

No	Uraian Sasaran	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (infrastruktur) bidang permukiman (ciptakarya) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan IKU:			
	a. Rumah tangga pengguna air bersih	76,00	77,100	101,44%
	b. Rumah tangga dengan akses aman bersanitasi	55,00	73,040	132,80%
	c. Drainase lingkungan kondisi baik	36,00	27,00	75,00%
	d. Rumah Layak Huni	72,00	75,27	104,54%
	e. Jalan Lingkungan Kondisi Baik	35,00	22,850	64,28%
	Rata –Rata Capaian sasaran			95,61%
	Rata-rata capaian IKU			95,61%

Secara kumulatif rata-rata capaian IKU yang merepresentasikan tercapainya sasaran strategis pada tahun 2017 adalah sebesar 95,61 % atau kinerja Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang pada tahun 2017 adalah baik. Adapun keberhasilan atau hambatan yang terjadi diuraikan dalam analisis hasil pengukuran kinerja.

## B. ANALISIS HASIL PENGUKURAN KINERJA

Analisis atas capaian setiap indikator kinerja bertujuan untuk mengetahui keberhasilan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dalam mewujudkan misi dan visi yang telah dituangkan dalam Renstra, sehingga dapat diupayakan langkah-langkah

perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di tahun berikutnya.

Analisis tersebut dilakukan dengan menganalisis atas perbedaan kinerja (*performance gap*) yang terjadi baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.

Uraian hasil analisis atas capaian setiap indikator kinerja untuk mengetahui kemajuan dan kendala pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang pada tahun 2017, adalah sebagai berikut :

1) Tujuan Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan infrastruktur bidang permukiman (keciptakarya) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat,

Tujuan tersebut mencakup satu sasaran strategis sebagai berikut :

1) Meningkatkan ketersediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan ketersediaan jaringan air bersih/air minum serta pembangunan infrastruktur, dengan indikator kinerja sasaran :

- Rumah tangga pengguna air bersih
- Rumah tangga dengan akses aman bersanitasi
- Drainase Lingkungan kondisi Baik
- Rumah Layak Huni
- Jalan Lingkungan Kondisi Baik

tersebut didukung oleh program dan kegiatan sebagai berikut :

a. Program Pembangunan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

- a) Perencanaan pembangunan jaringan air bersih/air minum
- b) Pembangunan Jaringan Air bersih/air minum

b. **Program Lingkungan Sehat Perumahan**

- a) **Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi Dasar Terutama Bagi Masyarakat Miskin.**

- c. Program Pengembangan Perumahan :
  - a) Penetapan Kebijakan, Strategis dan Program Perumahan
  - b) Pengembangan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat
- d. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong :
  - a) Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- e. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan :
  - a) Fasilitasi Pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar Permukiman Berbasis Masyarakat.
  - b) Koordinasi Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perumahan.
- f. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
  - a) Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam pdengelolaan air

Gambaran ketercapaian sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja sebagai berikut :

No	Indikator'	Target	Realisasi		%	% Kenaikan/ Penurunan
			2017	2016		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rumah tangga pengguna air bersih	76,00	77,100	70,25	101,44%	6,51%
2	Rumah tangga dengan akses aman bersanitasi	55,00	73,040	0,00	132,80%	132,80 %
3	Drainase Lingkungan Kondisi Baik	36,00	27,00	19,48	75,00%	55,52%
4	Rumah Layak Huni	72,00	75,27	10,31	104,54%	6,74%
5	Jalan Lingkungan Kondisi Baik	35,00	22,850	0,00	64,28%	64,28%

<b>Rata-rata capaian kinerja sasaran (9)</b>					95,61%	

Capaian kinerja sasaran Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan infrastruktur bidang permukiman (keciptakarya) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 95,61% maka capaian kinerja tersebut masuk dalam kategori baik. Capaian kinerja tersebut diukur dari capaian 5 indikator kinerja. Dari 5 indikator kinerja tersebut 2 indikator kinerja belum memenuhi target, tidak tercapainya target tersebut dikarenakan 2 indikator anggaran yang disediakan tidak mencukupi/masih kurang.

Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2016, capaian kinerja sasaran tersebut meningkat, di karenakan ada 2 indikator kinerja pada tahun 2016 tidak di targetkan yaitu Rumah tangga dengan akses aman bersanitasi dan Jalan Lingkungan Kondisi Baik karena target/realisasi tahun 2016 merupakan SKPD lama (Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan ESDM) sehingga ada perubahan target indikator untuk OPD baru (Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman) sehingga untuk tahun 2017 mengalami kenaikan 4,13 %.

Upaya yang ditempuh Pemerintah Kabupaten Batang Cq. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang dalam mencapai target dan menyempurnakan target capaian indikator kinerja ketersediaan jaringan air bersih/air minum, pembangunan infrastruktur jalan lingkungan dan pembangunan saluran drainase/gorong-gorong serta menambah jumlah personil serta melaksanakan sosialisasi peningkatan kualitas rumah layak huni yang didanai dari bansos (belanja tidak langsung).

### **C. AKUNTABILITAS KEUANGAN**

Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis tersebut diatas, Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang telah melaksanakan program dan kegiatan yang dibiayai dari APBD Kabupaten Batang. Anggaran dan realisasi biaya pelaksanaan kegiatan dan

program per sasaran berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran dan Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	Meningkatnya kualitas lingkungan permukiman dan cakupan pelayanan (infrastruktur) bidang permukiman (ciptakarya) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dicapai melalui program dan kegiatan sebagai berikut :			
	a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya :	3.831.333.500,-	3.275.884.699,-	85,50
	b. Program Pembangunan saluran drainase gorong-gorong	2.153.000.000,-	2.052.254.800,-	95,32
	c. Program Pengembangan Perumahan :	2.941.696.900,-	2.810.445.896,-	95,54
	d. Program Lingkungan Sehat Perumahan	380.237.000,-	372.730.000,-	98,03
	e. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan	200.000.000,-	193.321.250,-	96,66
	f. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku	168.575.000,-	154.878.119,-	91,87
	Jumlah anggaran dan realisasi sasaran	9.674.842.400,-	8.859.147.764,-	91,57

Berdasarkan tabel diatas, maka efisiensi anggaran yang tertinggi terjadi pada realisasi anggaran untuk membiayai Indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih pada Program Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya, sedangkan efisiensi terendah pada indikator capaian sasaran Tersusunnya perencanaan tata ruang yang baik dan terpadu serta pengawasan dan pemanfaatan ruang melalui penyusunan rencana tata bangunan dan lingkungan

Selain realisasi keuangan tersebut diatas capaian kinerja sasaran Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang tahun 2017

terdapat :

1. Program pelayanan administrasi perkantoran ;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur ;
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;

yang mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang tidak dapat didistribusikan dalam capaian kinerja sasaran diatas sebesar Rp 2.203.602.500,- dengan realisasi Rp 1.914.950.622,-

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang telah disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah, Pemerintah Dinas Perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Batang menyadari sekalipun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dikembangkan sejak awal era reformasi dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dalam penerapannya masih mengalami kendala karena pemahaman yang masih parsial, dan juga karena kesulitan mengubah paradigma untuk membangun manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented Government*).

Simpulan dan saran atas hasil pengukuran kinerja tahun 2017 adalah sebagai berikut :

1. Hasil yang diperoleh dari pengukuran Penetapan Kinerja Tahun 2017 dapat disimpulkan cukup berhasil/cukup baik.
2. Capaian kinerja yang melampaui target adalah Rumah tangga dengan akses aman bersanitasi melalui Pembangunan IPAL Komunal yaitu sebesar (132,80 %) dan Indikator Kinerja Rumah tangga pengguna air bersih (101,44%), dan Rumah Layak Huni (104,54%) melalui Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum Perdesaan dan Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) hal ini disebabkan karena anggarannya selain dari APBD Kabupaten Batang juga dari APBD Provinsi dan DAK Bidang Air Bersih dan Sanitasi, Sedangkan capaian indikator yang tidak mendapai target adalah Drainase lingkungan kondisi baik (75,00%) dan Jalan lingkungan kondisi baik (64,28%) hal ini disebabkan karena anggaran yang disediakan belum cukup/masih kurang.



Saran :

1. Walaupun capaian kinerja tahun 2017 termasuk dalam kategori baik namun mencermati hasil analisis masih terdapat kendala yang memerlukan upaya dan komitmen bersama untuk meningkatkan kinerja agar penetapan kinerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik terlebih lagi manfaat dan dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
2. Perlu dibangun mekanisme pengumpulan data kinerja yang baik sehingga proses pengukuran kinerja dapat berjalan baik serta menjadi umpan balik dalam mengevaluasi capaian kinerja atas kebijakan dan program yang dilakukan.
3. Salah satu kendala adalah belum optimalnya perumusan sasaran selaras dengan kegiatan dan program, dan belum tepatnya perumusan indikator kinerja sebagai tolok ukur untuk mengetahui capaian kinerja yang sebenarnya, beberapa indikator juga belum menyajikan penentuan target secara tepat. Dengan kata lain pengukuran kinerja tidak akan mampu menggambarkan capaian kinerja yang senyatanya apabila indikator kinerja tidak dirumuskan dengan tepat.